

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi tentunya memiliki pengaruh terhadap meningkatkan investasi daerah, karena apabila suatu daerah memiliki nilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka daerah tersebut dianggap merupakan daerah yang menjanjikan untuk ditanamkan investasi, karena meningkatnya pertumbuhan ekonomi juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tercermin melalui belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Apabila peningkatan penerimaan APBD kabupaten/kota di suatu provinsi ternyata tidak diikuti dengan peningkatan dana yang dialokasikan untuk investasi, hal tersebut akan berdampak terhadap penyediaan sarana fisik dan prasarana yang tidak memadai bagi daerah kabupaten dan kota yang mengalami pemekaran. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun (Sadono Sukirno, 2010).

Belanja Modal memiliki peran yang sangat penting guna meningkatkan infrastruktur publik, sehingga dapat mendukung peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Gunantara dan Dwirandra, 2014). Alokasi belanja modal untuk pengembangan

infrastruktur penunjang perekonomian, akan mendorong tingkat produktifitas penduduk (Harianto dan Adi, 2007)

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Boediono, 1985 dalam Adyatma & Oktaviani, 2015). Semakin tinggi persentase pertumbuhan ekonomi suatu daerah bisa disimpulkan semakin makmur dan semakin sejahtera daerah tersebut. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah harus baik pula. Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang berfungsi untuk membiayai kebutuhan daerah tersebut seperti pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Laju perekonomian di suatu daerah juga dipengaruhi oleh sarana prasarana di daerah tersebut, semakin baik fasilitas sarana dan prasarana di daerah tersebut maka akan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Siswiyanti, 2015).

Menurut Sirojuzilam (2015:10), pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pemerintah yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Indikator ini penting bagi daerah untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang.

Kesempatan dan pembagian hasil-hasil pembangunan. akan lebih merata jika pertumbuhan berjalan secara beriringan dan terencana. Dengan demikian maka daerah yang miskin, tertinggal tidak produktif akan menjadi produktif, yang akhirnya akan mempercepat pertumbuhan itu sendiri, strategi ini dikenal dengan istilah “*Redistribution With Growth*”

Pertumbuhan ekonomi di Tanah Karo menjadi perhatian bagi setiap daerah. Karena pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolok ukur kesejahteraan masyarakatnya. Untuk pemerintah daerah yaitu desa-desa yang ada di tanah karu terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya masing-masing melalui pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membangun sarana dan prasarana yang dibelanjai daerah melalui belanja modal. Belanja modal inidiharapkan akan memiliki manfaat dalam jangka panjang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka panjang

Pertumbuhan ekonomi disetiap daerah di Indonesia berbeda-beda, hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan daerah, pengembangan potensi daerah yang berbeda-beda pula. Salah satu daerah di Indonesia yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah Tanah Karo. Tanah Karo yang memiliki 17 kecamatan 269 desa/kelurahan. Pada penelitian ini akan membahas peningkatan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya, Pendapatan Asli Daerah yang digunakan daerah untuk membelanjai operasional daerah tentunya memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

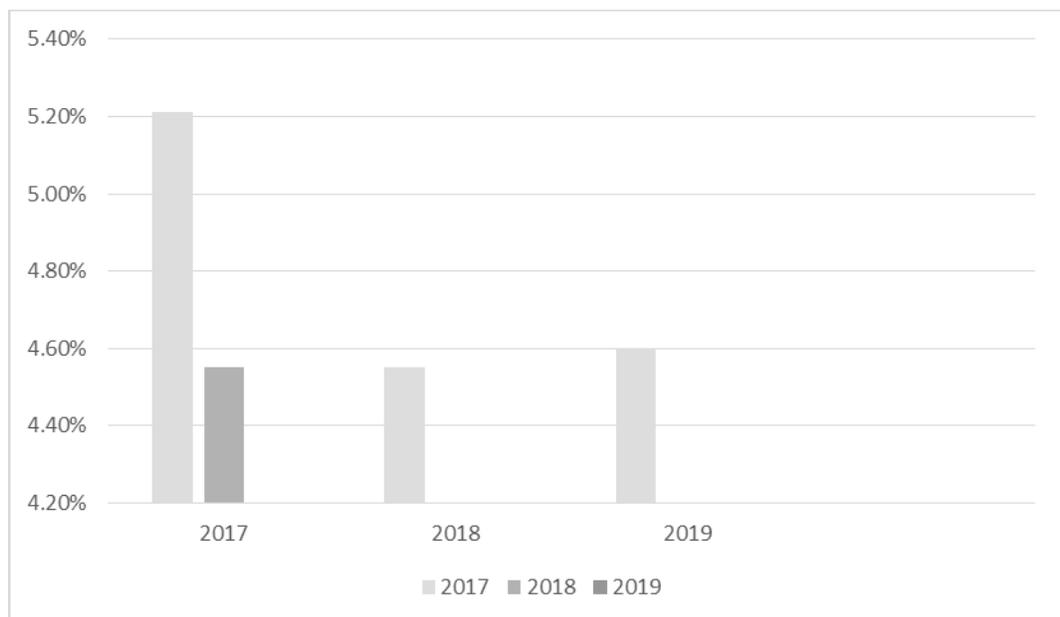
Berdasarkan data yang diperoleh, data belanja modal dan Pendapatan Asli Daerah di Tanah Karo dari tahun 2017 sampai tahun 2019.

Gambaran umum perkembangan pertumbuhan ekonomi Tanah Karo dari tahun 2017- 2019. Perekonomian Tanah Karo tahun 2017 tumbuh sebesar 5,21%. Semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan ini ditunjang dengan adanya pertumbuhan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi tanah karo yang tertinggi sebagian besar di dorong oleh 3 sektor utama yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan. Perdagangan besar dan eceran merupakan pertumbuhan tertinggi yaitu 6.05%. lapangan jasa keuangan dan asuransi memiliki pertumbuhan terendah yaitu minus 0,22%. Tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Tanah Karo turun menjadi 4,55% ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun sebelumnya yaitu 5,21%. Lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi memiliki pertumbuhan terendah yaitu sebesar 2,10%. Penyebab turunnya adalah Konsumsi Rumah Tangga yang hampir mencakup lebih separuh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Karo, yaitu sebesar 54,02%. Sumber pertumbuhan ekonomi diantaranya berasal dari Pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 3.13%, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1,91%, Import sebesar 1,01%, pengeluaran konsumsi Pemerintah sebesar 0,24% dan Ekspor Barang dan Jasa sebesar 0,22%. Pertumbuhan ekonomi Tanah Karo pada tahun 2019 bila dibandingkan tahun sebelumnya tumbuh menjadi 4,60%. Struktur perekonomian Kabupaten Karo pada tahun 2019 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 53,27%. Ada perubahan dari yang sebelumnya dimana, sebagian

lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif seperti industri pengolahan, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib dan penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 9,85%, 8,34%, dan 8,22. Peranan ketiga lapangan usaha tersebut mencapai 71,40 persen terhadap total PDRB Kabupaten Karo. Secara menyeluruh pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo pada tahun 2019 tidak ada yang negative. (Budi Simamora, SE.MM, Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik).

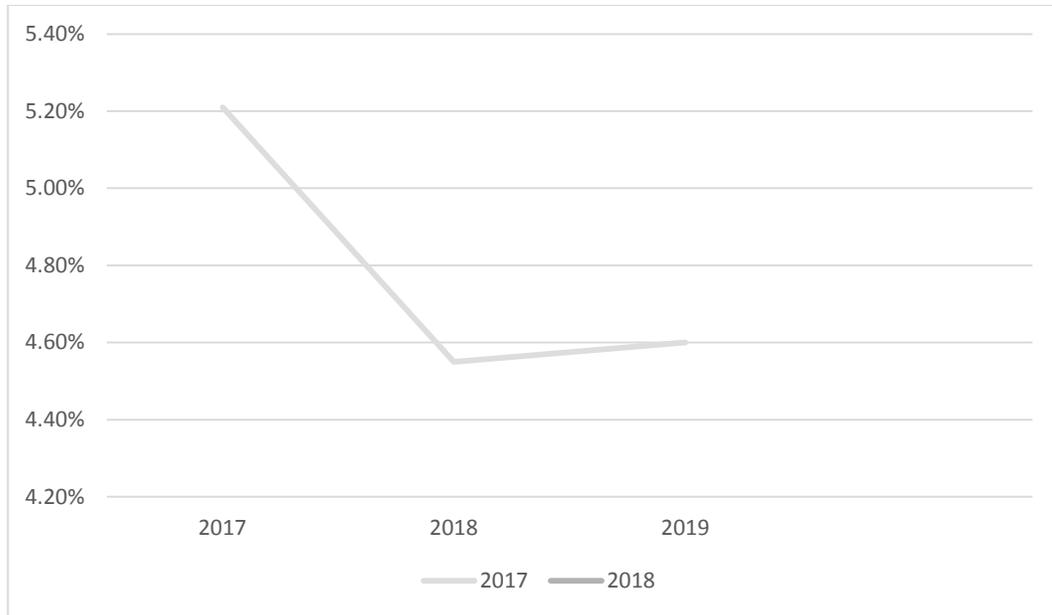
Table 1.1 tabel pertumbuhan ekonomi 2017-2019

Pertumbuhan ekonomi 2017-2019 (dalam persen)



Sumber: Data BPS (badan pusat statisti)

Tabel 1.2 Grafik pertumbuhan ekonomi 2017-2019



Sumber: Data BPS (badan pusat statistic)

Dari gambar pertumbuhan ekonomi di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten karo dari tahun 2017 sebesar 5,21% dan mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi sebesar 4,55%. Penurunan pertumbuhan ekonomi yang dialami kabupaten karo pada tahun 2018 sebesar 0,66% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi kabupaten karo mengalami peningkatan sebesar 0,05% dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 4,60%. Untuk itu belanja modal dan pendapatan asli daerah yang tinggi dapat menjadi alat untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang signifikan untuk daerah tanah karo.

Tabel 1.3 Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Tanah Karo

Tahun	Pertumbuhan ekonomi	Belanja modal	Pendapatan asli daerah
2017	5,21%	264.211.699.436	104.000.000.000
2018	4,55%	136.537.351.685	147.750.976.065
2019	4,60%	137.501.741.147	105.471.698.094

Setiap daerah mempunyai hak dalam mengelola keuangannya sendiri, dalam hal mengelola keuangan daerah nya sendiri disebut dengan Otonomi daerah. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Permasalahannya adalah masing-masing daerah mempunyai potensi sumber keuangan yang saling berbeda dan sudah pasti akan mengalami permasalahan yang berbeda pula dalam mencari sumber-sumber pembiayaan keuangan daerahnya.

Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Menurut UU No. 32 tahun 2004 proses penyusunan anggaran melibatkan pihak eksekutif (Pemerintah Daerah) dan pihak legislatif (DPRD), dimana kedua pihak tersebut melalui panitia anggaran. Eksekutif berperan sebagai pelaksana operasionalisasi daerah yang berkewajiban membuat rancangan APBD. Sedangkan legislatif bertugas mensahkan rancangan APBD dalam proses ratifikasi anggaran. Menurut Arsa (2015), Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama

menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi sedang berjalan. Pada mulanya upaya pembangunan negara yang sedang berkembang berkaitan dengan upaya peningkatan pendapatan per kapita, atau biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Penelitian Bati (2009) membuktikan bahwa belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya pertumbuhan ekonomi.

Maryati dan Endrawati (2010), hasil dari penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi dana alokasi khusus secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pasal 157 UU Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah. Sumber keuangan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah inilah yang dapat membuat daerah mempunyai keleluasaan atau kebebasan yang lebih besar ditambah dengan kreatifitas masing-masing daerah untuk memperoleh sumber pendapatannya sendiri berdasarkan kewenangan yang ada padanya, dan selain itu secara bebas pula dapat menggunakan hasil-hasil sumber keuangan daerah dari sektor ini guna membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah yang telah menjadi tugas pokoknya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi kasus di kabupaten karo 2017-2019).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan penjelasan di latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut berikut:

1. Turunnya pertumbuhan ekonomi 2018 disebabkan oleh turunnya konsumsi rumah yang menghabiskan lebih separuh PDRB. Pengeluaran konsumsi rumah tangga komponen PMTB dan ekspor merupakan 3 komponen yang memberikan pengaruh besar terhadap turunnya pertumbuhan ekonomi tahun 2018
2. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan pada sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Dimana 3 sektor tersebut paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karo.

1.3 Rumusan Masalah

1. Seberapa Besar pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di tanah karo?

2. Seberapa Besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di tanah karo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kecamatan kabupaten Karo.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kecamatan kabupaten Karo.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) 1.5.1 Kegunaan Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, informasi dan ilmu pengetahuan kepada pihak lain yang berkepentingan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa dengan pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

b) 1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian untuk memecahkan masalah yang terjadi pada belanja modal maupun masalah yang terjadi pada pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi yang sangat berpengaruh dalam memperoleh pengambilan keputusan perusahaan.